

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ALMIZAN

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: almizan554@gmail.com

Abstract

The theme of the article is based on economic principles Islam. The purpose of research is to see economic development in the perspective of the Islamic economy. Research is the study of literature. Economic development is one of the strategies to achieve the goals aspired nation. The goal is how poverty, unemployment, economic disparity and social resolved so as to realize human welfare. But in fact, the construction of which is expected to have an influence on society has not caused yet siding with the people. Increased poverty and unemployment occur, ultimately requires all state elites to reformulate development strategies that are better suited to be applied in a country rich in natural resources. Thus, there is no society that neglected and underdeveloped. It is appropriate experts economic, social, technological and political start doing a lot of studies on how to make successful development without being haunted by their poverty and unemployment. economic development as the growth of human maturity, in which material progress is inevitable and must be supported by the power of spiritual maturity. An important goal of employment growth coupled with reliable and skilled in their fields, will be the quality of the work that has quality, economic stability, distributive justice and concern for nature. Economic development is comprehensive Islam has the characteristics of an element of spiritual, moral, and material, and activities tend to be multidimensional so that all business submitted to balance a variety of factors and does not cause inequality.

Keywords: *Economic Development, Islamic Economics, Growth.*

PENDAHULUAN

Pada masa modern hari ini, bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Selama ini hanya terkenal dilakukan oleh masanya orde baru pada zaman soeharto. Namun pada kenyataanya masih belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran terjadi menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negeri tercinta ini. Sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang

tergeser, terjepit, dan terpinggirkan oleh sistem perekonomian. Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa dan salah satu bidang yang menjadi perhatian serius dan strategis disebabkan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negarapun dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan

neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi (Baswir, 2009).

Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonom dalam peradaban Islam seperti Ibnu Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) jauh hari telah menulis dalam karyanya masing-masing terkait masalah-masalah ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak, hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi, hingga hukum permintaan dan penawaran (Aedy, 2011). Bahkan ekonomi pembangunanpun telah lahir jauh sebelum itu, karena sejak instrumen zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam sebagai solusi kemiskinan (tahun ke-2 Hijrah), maka ekonomi Islam sejatinya telah memahami problem utama ekonomi pembangunan.

Ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka pasca perang dunia kedua. Namun faktanya, penduduk miskin di negara berkembang tetapsaja semakin banyak. Masalah utama ekonomi pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu masih belum bisa teratasi. Salah satu alasannya adalah karena tidak diperhatikannya variabel lain seperti sosial hukum, politik, budaya dan variabel pembangunan lainnya.

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif,

dimana ekonomi pembangunan bukan sekadar membangun perekonomian rakyat melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh. Bukan saja sisi jasmani, namun juga kebutuhan spiritual-transendental. Pertumbuhan ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam analisis makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas publik, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.

Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai "*economic development is growth plus change*" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi,

ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Pencampuradukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah: “*the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life*” (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral dan saling mempengaruhi (Mahrusy, 2009).

Menurut (Hasan, 2004). Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan

seperti pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Terkait isu kontrol populasi, Hasan melihat bahwa tidak terlepas dari norma-norma Syariah yang terkandung dalam Maqhasid Syariah. Sementara itu perspektif lain disampaikan oleh (Muhammad, 2010). Dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, ia menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*), dan ‘dematerialisasi’. Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban.

Dalam ekonomi Islam, kewirausahaan (*entrepreneurship*) sangat didorong. Begitu pula penggunaan teknologi mutakhir. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak dibedakan. Artinya, tidak ada pertentangan yang inheren antara nilai-nilai Islam dengan nilai yang ekonomi pembangunan inginkan (Ahmad, 2000). Meskipun pada faktanya banyak negara berkembang adalah negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim. Tulisan ini selanjutnya bertujuan hendak melihat konsep dan teori ekonomi pembangunan berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam, berikut ini adanya kesesuaian maupun perbedaan yang dijelaskan dalam teori ekonomi Islam dan konvensional. Hal tersebut menambah khasanah dari ilmu pengetahuan.

Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat

terapan (*applied economics*). Cabang ilmu Ekonomi ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua atau dua abad setelah lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya mereka bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut hingga cepat, tepat, dan tuntas.

Sementara itu, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai "*economic development is growth plus change*" (pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di tersebut terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampurkan penggunaan kedua

istilah tersebut. Pencampur adukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara.

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan: "*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*" (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. (Sadeq, 2006). Berlandaskan kepada kedua sifat dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapat suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut.

Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan dinegara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (Sukino, 2011). Selaras dengan hal ini, (Ibrahim, 2011) mengutarakan bahwa *concern* utama ekonomi pembangunan pada sistem ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia (*human welfare*). Proses pembangunan ekonomi dalam Islam menurutnya harus memanusiakan manusia. Ia harus terfokus terhadap pendidikan, mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan. Baginya, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang (*future generation*).

Sistem Pertumbuhan Menurut Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan

ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam (Beik, 2016). Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ahmad, 1997). Faktor-faktor tersebut adalah:

- (1) Sumber daya yang dapat dikelola (*investible resources*),
- (2) Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*), dan
- (3) Teknologi (*technology*).

Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor di atas sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Investable Resources

Maksud dari *Investable Resources* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan disiapkan-Nya kepada manusia untuk kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Islam juga memberikan *disinsentif* bagi *idle saving* melalui zakat. Setiap dana yang tidak produktifkan maka jumlahnya bisa berkurang karena disebabkan zakat. Untuk itu memproduksi dana ke sektor riil menjadi salah satu alternatif yang paling

menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan, apalagi diterapkan ditengah negara berkembang yang mana negara tersebut membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perekonomian negerinya (Beik, 2016).

Untuk itu, bagaimana caranya agar dana-dana tersebut bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang menjadi tujuan utama dari pembanguna. Jika dilihat dari konteks Indonesia pada hari ini misalnya, penyaluran dana bagi sektor pertanian dan kelautan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyerapan angkatan kerja oleh sektor pertanian dan kelautan serta persoalan yang tidak kalah adalah minimnya akses pemodalan yang membelit kedua sektor tersebut. Juga bagaimana membiayai infrastruktur negara yang masih sangat lemah kualitasnya sehingga berakibat pada ekonomi biaya tinggi. Dibutuhkan adanya perencanaan yang tepat, matang dan insentif kebijakan yang efektif.

Islam berusaha supaya sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya agar bisa menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemberian kebebasan mutlak kepada hak milik, tanpa ada pencegahan terhadap pelampauan batas yang dilakukan oleh para pemilik maupun pencegahan terhadap keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan aturan yang bertentangan dengan Islam. Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam (Mujahidin, 2013) memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Alquran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu sumber rezeki
2. Manusia adalah khalifah Allah Swt yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkan, dan memberdayakan alam dimuka bumi. Sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt.
3. Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk orang banyak.
4. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu menjaga, memelihara dan memakmurkannya bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keasian dan keindahan alam semesta.

Untuk itu ada tiga mekanisme yang ditawarkan dalam pemberdayaan sumber daya alam yaitu: *pertama*, diberdayakan oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami. *Kedua*, diserahkan pada orang lain untuk digarap tanpa adanya kompensasi. *Ketiga*, memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan yang diikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau seperempat. Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman, indutrsi, mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi

sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien.

Negara-negara muslim sudah seharusnya mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan sumber daya domestik seperti baik itu dari sisi manusianya, tabungan dan simpanan sukarela, pajak ataupun usaha lain berupa pemindahan sumber daya dari orang kaya kepada orang miskin. Munculnya pandangan pada tahun 1970 ketika *Club of Rome* mengangkat studi tentang keterbatasan pertumbuhan (*The Limit of Growth*). Studi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan yang diharapkan dalam pembangunan selama ini akan berakhir kurang dari 100 tahun. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada akan terkuras habis. Pemecahan atas persoalan ini memperkuat argument politik diatas. Karena jelas bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang bebas sepanjang dibenarkan berkembang menurut garis-garis kapitalisme tradisional akan segera menuju pada kebuntuan ekologi. Karena itu, perkembangan Negara-negara terbelakang sekali momentum pertama telah dicapai harus menemukan cara untuk penghematan bahan dan produksi sampai pada tingkat yang belum dikenal di Barat sekarang. Pemborosan sumber seperti pemakaian mesin cuci, televisi, dan alat-alat rumah tangga

yang meniru gaya penghidupan Barat tidak mungkin untuk ditiru oleh seluruh dunia (Todaro, 1989).

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini juga berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesewenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung didalamnya. Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada etika, maka konsep berkelanjutan (*sustainable*) adalah gabungan antara faktor-faktor politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi mendatang secara adil dan merata tanpa adanya suatu efek yang disakan untuk selanjutnya (Mubyarto, 2000).

Human Resources dan Entrepreneurship

Faktor kedua adalah SDM dan entrepreneurship. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah *entrepreneur* hingga 10 persen dan 4 persen dari jumlah penduduk mereka, Indonesia hingga tahun 2012 menurut kementerian koperasi dan UKM, baru memiliki *entrepreneur* sebanyak 0,18 persen dari jumlah penduduk. Padahal para wirausaha inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam

membangun kemandirian ekonomi (Beik, 2016).

Adapun terkait pengembangan budaya bisnis yang sesuai dengan syariah, ajaran Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syariah. Sebagai contoh adalah hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh baehaqi, dimana beliau bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengikarnya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan” Hadits tersebut, memberikan panduan bagaimana budaya bisnis yang harus dikembangkan oleh para pengusaha dan praktisi baik terkait dengan karakter pribadi yang harus dimiliki (jujur, amanah dan tepat janji), proses negosiasi bisnis yang tepat (membeli tidak mencela dan menjual tidak berlebih-lebihan), dan tentang utang yaitu bagaimana prinsip berutang dan prinsip menagih utang. Tinggal bagaimana mengintegrasikan dan menanamkan nilai-nilai syariah ini kedalam jiwa setiap entrepreneur. Disinilah pentingnya peran dari suatu pendidikan, baik itu bersifat formal maupun non formal. Tingginya kebutuhan akan SDM berkualitas dalam pengembangan ekonomi syariah harus bisa diatasi melalui program pendidikan yang terencana dengan baik, selain itu peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah sejak dini tentang

semangat berbagi misalnya, akan melahirkan generasi yang gemar untuk berzakat, infak dan sedekah, serta mencintai sesama.

Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional. Prinsip Islam terlihat berbeda dengan mainstream ekonomi konvensional yang hanya menekankan pada aspek kualitas profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral selama ini dianggap merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian ekonomi. Maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral tersebut. Oleh karena itu, menurut (Ahmad, 1997) Islam untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang baik dan spritual, orang tersebut dituntun oleh syarat-syarat berikut :

- a. Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini memberikan suatu jaminan moral seandainya ada penolakan kewajiban dalam kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan.
- b. Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima gaji secara penuh. Ia dicela apabila tidak memberi kerja yang baik dan optimal.

- c. Dalam Islam kerja merupakan ibadah sehingga memberikan implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan profesional.

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli kependudukan, dan ahli sumber daya manusia merumuskan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai target yang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Paradigma ini membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah penduduk, struktur umur, komposisi, penyebaran penduduk, pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, dan kesempatan kerja dan kesehatan melibatkan sumber daya manusia (Aedy, 2011).

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, *"Hendaklah kamu*

berdagang (berbisnis), karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki". Dalam hadits yang lain beliau bersabda, *"Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)"*.

Menurut Chapra (1992) salah satu cara yang paling konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif dan efisien. Dengan demikian, semangat entrepreneurship (kewirausahaan) dan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat jiwa kewirausahaan akan dapat mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi menunjukkan secara jelas kontribusi yang besar dari industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku, dan ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri berskala besar (Mutairi, 2002).

Karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum

telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan. Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan seseorang yang ingin menciptakan peluang pekerjaan sendiri kurang disadari bahwa tidak adanya wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini Islam sangat mendorong pengembangan semangat bagi wirausaha untuk menggalakan dan menyukseskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teknologi

Faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. *Technological progress* disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. bersabda: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya.*” (HR Baehaqi). Makna dari hadits tersebut sangat erat kaitannya dengan inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas tidak akan mungkin lahir sebuah karya. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk

menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif (Beik, 2016).

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara *gradual*, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaitan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain. Pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets ada lima kategori yaitu penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan yang biasa diikuti dengan penyempurnaan. Kuznets menganggap inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Inovasi terbagi

dua macam: pertama, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan pada apapun pada kualitas produk kedua, pembaharuan yang menciptakan suatu produk baru dan menciptakan suatu permintaan baru akan produk tersebut. Yang kedua ini merupakan perubahan yang menciptakan permintaan. (Guritno, 2012).

Islam tidak menantang konsep tentang perubahan teknologi seperti digambarkan di atas, bahkan dalam kenyataannya Islam mendukung kemajuan teknologi. Perintah Al-Qur'an untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup banyak dalam Al-Qur'an. Dalam terma ekonomi bisa perubahan teknologi. Dalam Al-quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia. Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumber daya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia. Disamping itu, negara terbelakang berada pada tingkat teknologi yang amat tidak efisien. Keterbelakangan teknologi, *pertama* tercemin pada ongkos produksi rata-rata yang tinggi meski upah buruh rendah. *Kedua*, pada tingginya rasio buruh output dan modal output pada umumnya faktor harga konstan mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah *ketiga*, pada besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih dan yang terakhir pada besarnya jumlah barang-barang modal yang diperlukan untuk menghasilkan output nasional.

Menurut (Heilbroner, 1982), kekurangan terhadap modal menghalangi proses

penghapusan teknik-teknik usang dan pemasangan teknik-teknik modern. Buta huruf dan ketiadaan buruh terdidik merupakan suatu rintangan lain di dalam penyebaran teknik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterbelakangan dalam ekonomi, bukan saja merupakan penyebab tetapi juga merupakan akibat keterbelakangan ekonomi itu sendiri. Keterbelakangan teknologi disebabkan oleh adanya dualisme yaitu penggunaan berbagai fungsi produksi sekaligus dalam sektor ekonomi yang maju dan sektor ekonomi yang tradisional yang tidak mau beralih kepada yang lebih baik. Keberadaan dualisme tersebut memperberat persoalan pengangguran struktural dan teknologis di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya (Aedy, 2011). adalah orientasi dari paradigma ini. Dengan memanfaatkan investasi dan teknologi, paradigma ini berharap dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, efisiensi, dan ekonomi. Ukuran yang digunakan untuk merencanakan atau menghitung pertumbuhan adalah produk nasional bruto (*Gross National Product*). Sedangkan asumsi yang dipakai adalah tetesan kebawah (*Trickle Down Effect*), yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pemerataan. Pada perkembangannya, konsep tetesan kebawah yang diharapkan oleh negara-negara yang menggunakan paradigma tersebut tidak terlaksana dengan optimal. Paradigma ini justru meningkatkan ketimpangan (*inequality*) yang makin mendalam antara kelompok yang

kaya dengan kelompok yang miskin. Dengan kata lain, paradigma ini dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam sistem pemerataan. Padahal yang diharapkan tidak sekedar memaksimalkan produktivitas, tetapi juga mengatasi masalah-masalah ketimpangan antar kelompok.

Pembangunan Sektor Pendidikan

Untuk menjawab suatu tantangan perekonomian global yang semakin besar dimasa akan datang, maka diperlukan upaya dan langkah strategis yang tepat dan efektif. Jika melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka solusi jangka panjang terbaik yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah dengan sistem sektor pendidikan berkualitas, sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan *capable*. Sektor pendidikan inilah yang akan memproduksi SDM negara, yang akan membawa negara tersebut apakah ke-arah yang lebih baik dimasa depan, atau sebaliknya malah memperburuk kondisi negara untuk masa akan datang. Menurut (Hafidhuddin, 2013) pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang, sehingga dalam sepanjang sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, meskipun dengan sistem dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup dan budaya masyarakat masing-masing. Bahkan, pendidikan juga dijadikan sarana penerapan suatu pandangan hidup. Tujuan akhir dari proses ini adalah terciptanya *civil society* yang

memiliki karakter yang baik (*al insan al kamil*). Bahwa tujuan dari asasi pendidikan dalam Islam menurut Omar M Al Tauny (1979) sebagai berikut:

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Dengan demikian maka akhlakul karimah merupakan jiwa dari setiap pendidikan Islam.
2. Untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat secara sekaligus.
3. Untuk memperkuat anak didik memelihara ruh ilmiah (*scientific spirit*) dan keinginan untuk terus mencari dan menemukan sesuatu (*curiosity*).
4. Mempersiapkan anak didik agar menguasai suatu keahlian tertentu, keahlian yang mereka minati tersebut disesuaikan dengan suatu bakat dan kemampuannya.
5. Mempersiapkan anak didik untuk memiliki tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah Swt dan sebagai makhluk sosial.
6. Mengajak anak didik dalam memahami hikmah (rahasia) dari penciptaan alam semesta dan upaya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebabnya, pendidikan tidak hanya menyangkut aspek materiil dan kedunian saja, namun juga terkait dengan aspek spiritual dan berorientasi pada akhirat. Sehingga, desain sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kedua aspek ini secara seimbang. Keseimbangan ini akan tercapai apabila sisi yang dibangun dalam

dunia pendidikan kita bukan hanya aspek pengetahuan semata, melainkan juga aspek akhlak dan prilakunya. Pendidikan yang dijalani pada saat ini, kecenderungan proses pendidikan di Indonesia sepertinya lebih menitikberatkan pada sistem *transfer of knowledge*. Fokusnya adalah peningkatan kemampuan intelektualitas peserta didik. Sementara aspek ruhiyah dan akhlak kurang mendapat tempat yang baik didalam tatanan pendidikan. Akibatnya, muncul berbagai fenomena yang tidak wajar ada dalam dunia pendidikan seperti terjadinya tawuran antar pelajar, ada seorang siswa yang sampai memukul dan bahkan menganiaya gurunya sendiri secara bersama-sama, pergaulan bebas dan semakin jauhnya anak didik dari nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Terjadinya kecurangan ketika pelaksanaan ujian nasional yang sangat bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa. Dengan melihat pada konteks pendidikan ekonomi SDM pada khususnya di dalam perbankan syariah. Bagi seseorang bekerja diperbankan konvensional untuk pindah ke bank syariah haruslah dengan melalui pendidikan tertentu terlebih dahulu (training dan pelatihan). Ketika telah dalam tahap pelatihan diberikan materi nuansa ekonomi Islam, baik itu sejarah, teori-teori dan etika bisnis dalam Islam.

PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi Meningkatkan Kesejahteraan

Istilah pertumbuhan ekonomi berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu

negara. Pertumbuhan eksponensial merupakan peningkatan yang diperlihatkan melalui persentase tetap terhadap keseluruhan pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang paling banyak yang telah digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sering dipersentasikan oleh pertumbuhan PDB, produk nasional bruto (PNB), PDB perkapita dan pendapatan perkapita. Konsep yang diusung secara konvensional memiliki kelemahan karena semua ukuran tersebut hanya mencerminkan nilai ekonomi, bukan nilai manfaat sebagaimana ilmu berkembang sekarang. Oleh sebabnya indikator-indikator tersebut tidak menunjukkan kerugian akibat polusi, kepadatan terhadap penduduk dan bencana alam. Terlebih lagi, tidak pula mencerminkan aspek distribusi atau pemerataan.

Namun, persentase pertumbuhan ekonomi mulai menampakkan indikasinya terkait dengan berapa jumlah lapangan kerja yang tersedia, serta berapa tingkat produksi di suatu negara. Secara konvensional telah dikembangkan suatu indeks yang sering dijadikan proksi pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor riil yaitu *industrial production index* (IPI). Kritik lainnya adalah terhadap konsep pertumbuhan ekonomi yang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi konvensional, bahwa pertumbuhan tersebut hanya mengukur volume barang dan jasa selama satu tahun tanpa memperhatikan aspek *shariah compliance*. Dengan kata lain pertumbuhan tersebut tidak memerhatikan aspek halal

dan haram maupun aspek kesesuaian syariah lainnya. Sebagai contohnya kontribusi industri jasa keuangan konvensional terhadap PDB Indonesia memberikan hasil yang signifikan dan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growt with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, tergantung pada dari perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks surat QS. 106: 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian, jika merujuk pada ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama. *Pertama*, sistem nilai Islami *kedua*, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan) *ketiga*, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi *keempat*, keamanan dan ketertiban sosial.

Pada indikator *pertama*, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Swt. Justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia. Pada indikator *kedua*, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerapkan angkatan kerja

paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil. Indikator *ketiga* adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Sedangkan pada indikator yang *keempat*, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.

Dalam pandangan ajaran Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan suatu keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan bangsa, apakah bangsa tersebut dengan mudah didikte oleh kepentingan oleh bangsa asing atau tidak. Jalan

untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini, tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep kemaslahatan. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian tidak semua yang bermanfaat akan memberikan keberkahan. Akan tetapi, semua yang berkah pasti bermanfaat. Sebagai contoh, minuman keras baru kali memberikan suatu manfaat bagi pemerintah dengan melalui pajak. Namun bisa dipastikan bahwa minuman keras pasti membawa pada ketidakberkahan. Mudharatnya lebih besar ketimbang dari manfaatnya (QS. Al-Baqarah: 219 dan Al-Maidah: 90-91).

Akselerasi terwujudnya kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting karena terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian baik dan seoptimal mungkin. Tentu, hal ini tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek yang sangat fundamental Menurut (Beik, 2016) yaitu transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*amanah dan masuliyah*). Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan di dalam memberikan akses informasi kepada publik. Tata kelola perekonomian yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki ruang untuk mengakses beragam informasi yang relevan, serta memberikan masukan dan saran bagi

perbaikan kinerja perekonomian. Indikator merupakan prinsip dasar yang akan menjamin bekerja mesin perekonomian, serta menentukan kualitas *output* yang dihasilkannya. Ajaran Islam telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa profesional (*itqan*), sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Profesionalitas juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perekonomian dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Setiap orang pasti akan diminta suatu pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya baik indikasi jalan kebaikan atau jalan yang kurang baik atau keburukan dan dicatat oleh Allahi, dalam melihat dari konteks tata kelola perekonomian pertanggungjawaban ini sangat erat hubungannya dengan aspek administratif dan aspek etika. Hal tersebut merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan akan selaras atau sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi tanpa terkontaminasi oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu etika merupakan instrumen yang menjamin sisi kepatuhan dan kewajaran suatu aktivitas perekonomian. Segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara administratif, belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara etika.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan ekonomi Islam sebagai madzab ekonomi memiliki pengertian.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam adalah *pertama*, Islam yang didalamnya terjelma cara mengatur kehidupan perekonomian yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia. *Kedua*, Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam. Pengertian diatas, Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai-nilai dasarnya adalah Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tata krama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya (Saud,1991).

Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi

ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat luhur. Kedua madzab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya. Sehingga mereka saling bertengkar untuk bersaing, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok kapitalisme dan sosialisme. ekonomi Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonominya selalu mengedepankan kerjasama dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saling tolong-menolong.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi (Al Maududi, 1985).

Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur, ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim bahnanya berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt (Chapra, 1992).

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam sebagaimana yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini

pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran - pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya.

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada saat ini tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya kekuatan kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti : pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan terampil di bidangnya, akan menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu : (1). *Tauhid rububiyah*, yaitu konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (*growth with equity*), (3). *Khalifah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt. di muka bumi untuk memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya, dan (4). *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam

hubungannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan (d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia.

Pendekatan konsep ekonomi Islam ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Manusia adalah subjek dan objek dari pembangunan. Kualitas dari SDM sangat menentukan tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan SDM perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius oleh bangsa, apalagi esensi atau aspek kemajuan dari suatu bangsa di dunia adalah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa atau negara tersebut (Beik, 2016). Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi. Bentuk-bentuk dari faktor tersebut adalah : (1) Sumber daya yang dapat dikelola (*invisible resources*), (2) Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*), dan (3) Teknologi (*technology*). Kekhususan

pada pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin.

KESIMPULAN

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan, akan menjadi suatu kualitas pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya. bahwa Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt.

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam.

Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terbelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia.

Untuk menjawab suatu tantangan perekonomian global yang semakin besar dimasa akan datang, maka diperlukan upaya dan langkah strategis yang tepat dan efektif. Jika melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka solusi jangka panjang terbaik yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah dengan sistem sektor pendidikan berkualitas, sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan *capable*. Sektor pendidikan inilah yang akan memproduksi SDM negara, yang akan membawa negara tersebut apakah kearah yang lebih baik dimasa depan, atau sebaliknya malah memperburuk kondisi negara untuk masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Khursid. 1997. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Risalah Gusti: Jakarta.
- Al-Maududi, A. 1985. *Prinsip-prinsip Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Toumy. 1979. *Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge*. The Islamic Foundation and IIIT: United Kingdom.
- Hasan, Zubair. 2004. Measuring Efficiency of Islamic Banks: Criteria, Methods, and Social Priorities. *Review of Islamic Economics*. 8 (2): 5-30.
- Hafidhuddin, Didin. 2013. Analisis Syariah Tentang Kemiskinan. Bogor: Makalah dipresentasikan pada FGD Nasional pengentasan Kemiskinan.
- Heilbroner, Robert L. 1982. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Patmawati, Siti Arni Basir, and Asmak Ab Rahman. 2011. Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective,

- European Journal of Social Sciences*, 24 (3): 330-338.
- Kahf, Monzer. 1998. Role of Government in Economic Development: Islamic Perspective. *Paper Presented at the Seminar on Economic Development, Sains Univ Penang-Malaysia*.
- Mohammad, Tahir Sabit Haji. 2010. Principles of Sustainable Development in Ibn Khaldun's Economic Thought. *Malaysian Journal of Real Estate*, 5 (1): 1-18.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mujahidin, Ahmad. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mutairi, Hezam Mater. 2002. Ethics of Administration and Development in Islam: A Comparative Perspective, *Journal of King Saud University, Administrative Sciences*, 14 (1): 49-64.
- Revrison, Baswir. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadeq, Abulhasan M. 2006. *Development issues in Islam*. Kuala lumpur: IIUM Research Center.
- Saud, Mahmud Abu. 1991. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Bima Grafika.
- Todaro, Michael, P. 1989. *Economic Development in The Third World*. New York: Longman.